BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Sejarah Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi itu sebagai pelaksanaan *Bestuurshervormingwet* tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah Provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah "Soendalanden" (Tatar Soenda) atau "Pasoendan", sebagai istilah geografi untuk menyebut Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

3.1.2 Geografi Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yaitu bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik

tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa. Letak geografi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
Lokasi Geografis Provinsi Jawa Barat



Sumber : *http://westjavainvest.com*

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 29,275.62 kilometer2, Lokasi geografis terletak di 0 ° 50 ‘ dan 70 ° 50’ LS 104 ° 48 ‘ dan 108 ° 48’ BT dan Provinsi Jawa Barat ini memiliki iklim tropis, suhu berkisar antara 9 ° C di puncak Gunung Pangrango sampai 34 ° C di sepanjang pantai utara. Curah Hujan 2.000 mm – 5.000 mm per tahun. Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yaitu bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik

tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

3.1.3 Mata Pencaharian Penduduk Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Daerah dengan kepadatan penduduk terbesar berada di dekat Jakarta. Bandung, ibukota Provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda, yang bertutur menggunakan Bahasa Sunda. Di sepanjang pesisir utara, dituturkan Bahasa Jawa dialek Cirebon, yang mirip dengan Bahasa Jawa dialek Tegal. Di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Kabupaten Bogor bagian utara dituturkan bahasa Indonesia dialek Betawi.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada.

Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis kelautan guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan.

3.2 Gambaran Umum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

3.2.1 Sejarah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

Latar belakang pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat didasari oleh adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka reformasi birokrasi pelayanan publik di Jawa Barat. BPPT Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perijinan telah dilaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu sesuai kewenangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka pada bulan Juli tahun 2007 dibentuklah Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah melaksanakan pelayanan perijinan di wilayah provinsi Jawa Barat sebanyak 111 jenis perijinan meliputi 59 jenis layanan ijin dan 52 jenis layanan non ijin.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat sebelumnya memiliki nama Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Provinsi Jawa Barat yang merupakan suatu kegiatan penyelenggara perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen hanya dilakukan dalam satu tempat. Ditetapkannya Peratuan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2008 tentang Organisasai dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, maka penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan administratif PPTSP Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (unit PPTSP) tahun 2007 yang dikoordinasikan oleh Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Jawa Barat. Maksud Penetapan Pelayanan Perijinan Terpadu di Jawa Barat yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan perijinan yang tepat, mudah, transparan dan memberikan kepastian hukum.
2. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan penanam modal untuk mendapatkan pelayanan dibidang perijinan.
3. Menciptakan citra pelayanan prima di Jawa Barat

Berikut ini adalah fungsi dari lembaga Pelayanan Perijinan Terpadu (PPT) dan OPD Teknis setelah menjadi BPPT Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari tabel 3.1 yaitu :

Tabel 3.1
Fungsi Lembaga PPT dan OPD Teknis

Masih UNIT PPTSP	**SKPD TEKNIS**
1. Pelaksanaan Administrasi Perijinan 2. Sinkronisasi & Integrasi Perijinan	1. Kebijakan Teknis Sektoral 2. Perencanaan Teknis Sektoral 3. Pembinaan Teknis Sektoral 4. Pengawasan Teknis Sektoral 5. Penandatanganan Perijinan
Setelah Menjadi BPPT	**OPD TEKNIS**
1. Pelaksanaan Administrasi Perijinan 2. Sinkronisasi & Integrasi Perijinan 3. Penandatanganan Perijinan	1. Kebijakan Teknis Sektoral 2. Perencanaan Teknis Sektoral 3. Pembinaan Teknis Sektoral 4. Pengawasan Teknis Sektoral

Sumber : BPPT Provinsi Jawa Barat

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang perijinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (PerdaNo. 24 Tahun 2008). Salah satu tugas Pemerintah yang sekaligus juga hak dari warga adalah terselenggaranya pelayanan publik perijinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Relasi antara pemerintah dan warganya seringkali perijinan menjadi indikator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai kondisi "*Good Governance*" atau belum.

Birokrasi Perijinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jawa

Barat. Masyarakat dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perijinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti, dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya-biaya tidak resmi.

Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menindak lanjuti Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim Invastasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Perijinan Terpadu yang merupakan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini adalah jenis-jenis pelayanan perijinan dari layanan ijin maupun layanan non ijin yang ada di BPPT Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari Tabel 3.2 berikut ini :

HAL 81 S/D 87 ADA DI LAMPIRAN

Pada tabel 3.2 ini dapat dijelaskan bahwa BPPT Provinsi Jawa Barat memiliki 59 jenis dari layanan ijin sedangkan untuk layanan non ijinnya BPPT Provinsi Jawa Barat memiliki 52 jenis layanan non ijin dari masing-masing bidang perijinan. Layanan bidang perijinan yang paling banyak ijinnya adalah pada bidang perijinan perhubungan yaitu 12 jenis perijinan sedangkan untuk layanan non ijin bidang perijinan yang paling banyak adalah perijinan pada sub bidang peternakan.

Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraannya mempunyai visi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Visi BPPT Provinsi Jawa Barat adalah " BPPT Jabar Menjadi Lembaga Pelayanan Perijinan Yang Memuaskan Tahun 2013 ". Sehubungan dengan hal tersebut, maka Misi BPPT Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur dalam rangka melaksanakan pelayanan prima;
2. Melaksanakan Deregulasi dan Debirokratisasi Pelayanan;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Yang Memadai;
4. Mengembangkan Integrasi Sistem Informasi Pelayanan yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Memfasilitasi Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu;

6. Mendorong peningkatan pelayanan serta terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelayanan perijinan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

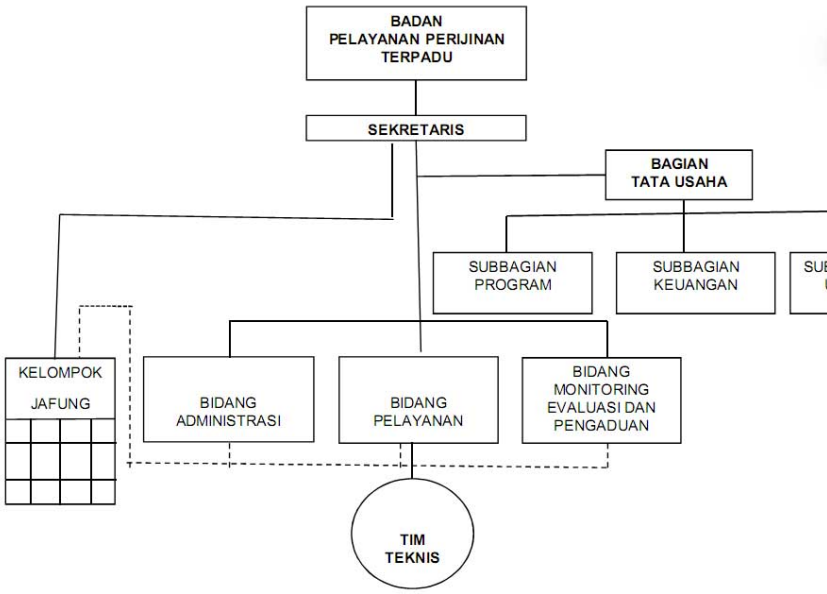
Tugas Pokok Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu meliputi ketatausahaan, administrasi, pelayanan, monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan. Fungsi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :

1. Fungsi Penyelenggaraan penyusunan program Badan;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pembinaan perijinan;
3. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perijinan;
4. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan dan penanganan pengaduan;
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat untuk dapat menjalan tugasnya maka memiliki struktur organisasi yang dapat di lihat pada bagan berikut ini:

Bagan 3.1
Struktur Organisasi BPPT Provinsi Jawa Barat



Sumber: Perda No. 24 Tahun 2008

Berikut ini beberapa tugas pokok dan fungsi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat :

1. Sub Bagian Program

a. Sub bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan dan fasilitasi program pelayanan perijinan terpadu.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub bagian Program mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyusunan program pelayanan perijinan;

b) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pelayanan perijinan.

2. Bidang Pelayanan

1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan perijinan terpadu.

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan.

b. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan perijinan terpadu.

3) Rincian Tugas Bidang Pelayanan :

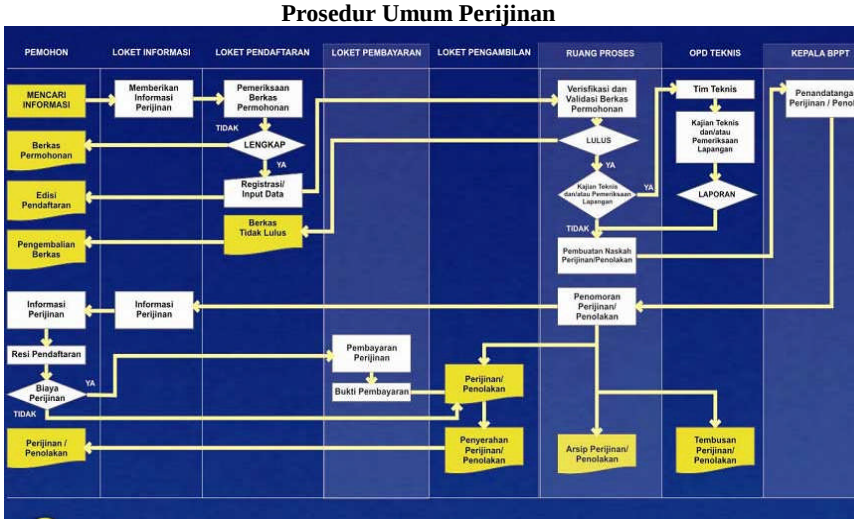
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan;

b. Menyelenggarakan koordinasi dengan tim teknis dan pengolahan pelayanan perijinan;

c. Menyelenggarakan validasi berkas permohonan perijinan;
d. Menyelenggarakan perhitungan dan penetapan retribusi perijinan;
e. Menyelenggarakan penyusunan naskah perijinan dan pedoman teknis pengolahan perijinan;
f. Menyelenggarakan penerbitan naskah perijinan;
g. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan perijinan terpadu;
h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan;
i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut ini alur prosedur dari pelayanan perijinan yang ada di BPPT Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari prosedur umum perijinan dan prosedur umum pengaduan:

Gambar 3.2
Prosedur Umum Perijinan

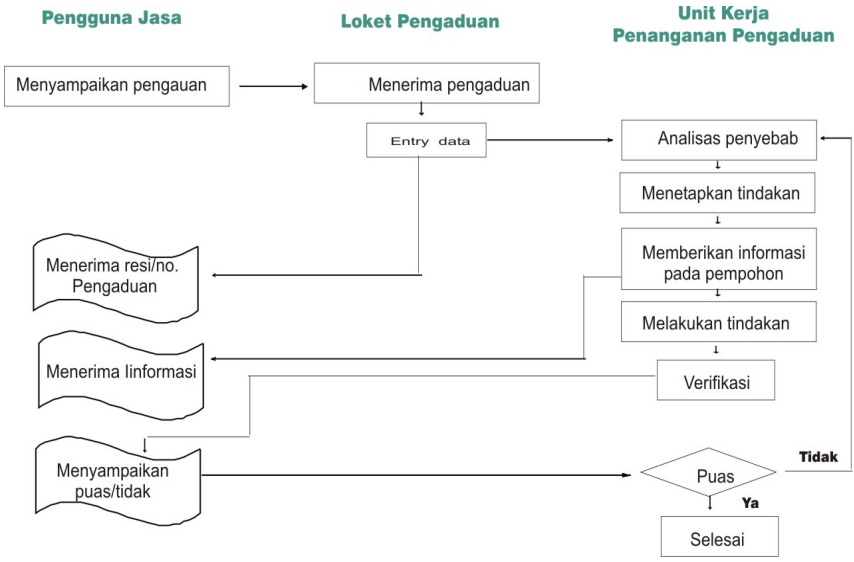


Sumber : *http://www.bpptjabar.com* [2010]

Tata cara atau prosedur pelayanan perijinan pada gambar 3.1 dapat dijelaskan pertama tama pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan, pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran, petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila sesuai dengan persyratan, petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan, petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyratan dengan ketentuan apabila tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan segera diperbaiki oleh pemohonm, berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi, apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemrosesan

berkas dfikembalikan kepada pemohon, tetapi sebaliknya jika berhasil naskah ijin maupun non ijin dapat diproses untuk ditandatangani kepala badan, setelah itu tim teknis membuat laporan pemeriksaan lapangan dan pengkajian dilengkapi dengan berita acara kepada kepala badan dengan tembusan kepada kepala OPD yang bersangkutan, apabila berdasarkan pemeriksaan lapangan memenuhi persyaratan kepala badan menandatangani ijin dan non ijin, perijinan yang sudah ditandatangani oleh kepala badan selanjutnya disampaikan ke bidang administrasi dan diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang diinformasikan kepada pemohon bahwa proses perijinan telah selesai, pemohon mengambil surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan membayar loket pembayaran yang telah disediakan, berdasarkan bukti pembayaran yang telah diregistrasi pemohon mengambil perijinan ke loket pengambilan pada bidang administrasi dan proses terakhir naskah atau penolakan ijin atau non ijin yang sudah ditandatanagni dapat diserahkan kepada pemohon. Berikut ini adalah alur prosedur dari pengaduan :

Gambar 3.3
Prosedur Umum Pengaduan



Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

Tata cara atau prosedur pengaduan pada gambar 3.2 dapat dijelaskan pertama-tama pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu oleh badan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, langkah kedua pengaduan dilakukan secara baik-baik secara lisan maupun tulisan melalui media yang disediakan, langkah terakhir pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh badan selambat-lambatnya dalam waktu lima hari kerja.

3.2.5 Keadaan Aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

Keadaan aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat, yang diklasifikasikan susunannya menjadi dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tenaga Kontrak (TKK). Jam Kerja aparatur dimulai pada hari Senin sampai Jum'at pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB. Setiap hari pada pukul 07.30-08.00 melaksanakan apel pagi dan khusus pada hari jum'at diadakan senam kesegaran jasmani (kegiatan jumsihat) atau kegiatan olah raga lainnya dan pada pukul 09.00-09.30 para aparatur melakukan kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan setelah itu melaksanakan pekerjaan rutin. Adapun perincian jumlah BPPT Provinsi Jawa Barat, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berdasarkan pangkat atau golongan ruang dan jabatan dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.3
Daftar Pegawai Negeri Sipil Daerah dan THL
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
Provinsi Jawa Barat

No	N A M A Nomor Induk Pegawai	Pangkat/ Golongan ruang	JABATAN
1	Drs. A. Sofyan Sastrawiria,M.Si 19570609 198503 1 004	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Badan
2	Ir. Susilawati, MS 19600821 198503 2 003	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bagian Ta Usaha
3	Iis HildawatI, SE 19680208 199403 2 002	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Bagia Umum
4	Castori, SE 19580709 198303 1 011	Penata III/c	Pelaksana Sub Ba Umum
5	Yos Koswara,S.Sos 19611109 198503 1 007	Penata III/c	Pelaksana Sub Ba Umum

6	H. Jaja Somantri 19550623 198412 1 001	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana Sub Ba Umum
7	Tisna Sukarna 19641027 199103 1 008	Penata Muda III/a	Pelaksana Sub Ba Umum
8	Yuyus Ahmad Yusron,SS 19740110 200604 1 003	Penata Muda III/a	Pelaksana Sub Ba Umum
9	W i w i n Komariah 19810628 200003 2 001	Pengatur II/c	Pelaksana Sub Ba Umum
10	H. Dedi KusnadI 19570427 198503 1 004	Pengatur II/c	Pelaksana Sub Ba Umum
11	Diah Rakhmawati 19730310 200701 1 006	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Sub Ba Umum
12	Sulaeman Rahmat 19710506 200701 1009	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Sub Ba Umum
13	Anto Hadianto 19761104 200701 1 007	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Sub Ba Umum
14	Suwarno 19630723 200701 1 006	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Sub Ba Umum
15	Asep Mulyana 19731122 200701 1 006	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Sub Ba Umum
16	Agus Triyadi 19710804 200701 1 007	Juru I/c	Pelaksana Sub Ba Umum
17	Drs.H.Moch. Bagja Rahman,MM 19621224 198910 1 001	Pembina IV/a	Kepala Sub Bagia Keuangan
18	H. Wagimin, S.IP 19590506 198103 1 011	Penata Tk.I III/d	Pelaksana Sub Ba Keuangan
19	Hj. Teuis Badriah 19580502 198503 2 007	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana Sub Ba Keuangan
20	Hj. Djudju Djulaeha 19570527 197902 2 001	Penata Muda III/a	Pelaksana Sub Ba Keuangan
21	M i r a, SE 19750827 199803 2 003	Penata Muda III/a	Pelaksana Sub Ba Keuangan
22	Rohman 19620524 200701 1 002	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Sub Ba Keuangan
23	Drs.H.Hadiyat Afandi,Ak,MM 19561117 198503 1 008	Pembina IV/a	Kepala Sub Bagia Program
24	Mariany Iswara, MM 19730321 200801 2 008	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana Sub Ba Program
25	Tarsidi 19570325 198612 1 001	Penata Muda III/a	Pelaksana Sub Ba Program
26	Nita Fuji Astuti, SE 19750211 200701 2 007	Penata Muda III/a	Pelaksana Sub Ba Program

27	Yuyu Herdiana 19550606 198401 1 002	Pengatur II/c	Pelaksana Sub Ba Program
28	Drs. Adang Hardiyat 19581029 198303 1 004	Pembina IV/a	Kepala Bidang Administrasi
29	Dra.Hj. Ratna Setiawati 19570901 198603 2 005	Penata Tingkat I III/d	Pelaksana Bidang Administrasi
30	Dra. Ida Nurhayati 19550130 198203 2 002	Penata Tingkat I III/d	Pelaksana Bidang Administrasi
31	Dadah Jayasukarma,BA 19581224 198203 2 008	Penata Tk.I III/d	Pelaksana Bidang Administrasi
32	Eli Komalasari, S.Sos, M.Si 19721001 199803 2 005	Penata III/c	Pelaksana Bidang Administrasi
33	Irma Hadiyanti, ST 197806132009012001	Penata Muda III/a	Pelaksana Bidang Administrasi
34	Yusi Lupitasari A,A.Md.G 19830207 200501 2 003	Pengatur Tingkat I II/d	Pelaksana Bidang Adminstrasi
35	Dhanie Sidharta 19620408 199312 1 001	Pengatur Tingkat I II/d	Pelaksana Bidang Administrasi
36	Eri Ridho Rahmi 19750106 200701 2 003	Pengatur II/c	Pelaksana Bidang Administrasi
37	Ginanjar Setia Lencana 19690125 200701 1 004	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Bidang Administrasi
38	Herry Pasya Sumbada, A.TD 19650125 198803 1 006	Penata Tk.I III/d	Kepala Bidang Pelayanan
39	Dindin Jamaludin, SH 19640807 199103 1 011	Penata Tk.I III/d	Pelaksana Bidang Pelayanan
40	Yadi Patyadi,S.Pt 19641213 198903 1 006	Penata III/c	Pelaksana Bidang Pelayanan
41	Unang Maman 19600224 198503 1 010	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana Bidang Pelayanan
42	Iing Supriatna 19591119 198409 1 001	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana Bidang Pelayanan
43	Abdul Haris 19610317 198310 1 002	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana Bidang Pelayanan
44	Rita Juwita Ningsih 19581023 197901 2001	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana Bidang Pelayanan
45	Yani Heryani, S.Sos 19730718 200701 2 005	Penata Muda III/a	Pelaksana Bidang Pelayanan
46	Faridha Dwi Astuti 19730228 199302 2 001	Penata Muda III/a	Pelaksana Bidang Pelayanan
47	Drs. Indra Hermawan 19700717 200701 1 018	Penata Muda III/a	Pelaksana Bidang Pelayanan

48	Ace 19760825 199603 1 005	Pengatur Tingkat I II/d	Pelaksana Bidang Pelayanan
49	Cahyawati, SE 19791104 200701 2 007	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Bidang Pelayanan
50	Drs.Daradjat,M.Si 19560608 198001 1001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang M dan Pengaduan
51	Dra. Rochaeti, Apt 19600704 199003 2 001	Pembina IV/a	Pelaksana Bidang Monev dan Penga
52	TB. H. Chasbunalloh, SH 19610212 198403 1 011	Penata Tingkat I III/d	Pelaksana Bidang Monitoring, Evalu dan Pengaduan
53	Iis Suryati 19600128 198603 2 008	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana Bidang Monitoring, Evalu dan Pengaduan
54	Duduh D.Sudradjat, S.Sos 19680505 200801 1 007	Penata Muda III/a	Pelaksana Bidang Monitoring, Evalu dan Pengaduan
55	Deni Rusyana, S.AP 19760803 199803 1 005	Penata Muda III/a	TUGAS BELAJA
56	Derry Rinaldi, ST	TKK	Pelaksana Sub Ba Keuangan
57	Sinta Susanti	TKK	Pelaksana Bidang Monev dan Penga
58	Enni Elahayati	TKK	Pelaksana Sub Ba Keuangan
59	Lucky Nurhidayat		THL Bidang Mon Pengaduan
60	Moh. Muttaqin		THL Sub Bagian Program
61	Mila Suci Sumiaty		THL Sub Bagian Keuangan
62	Freddy Kurniawan		THL Sub Bagian
63	Otong Toni		THL Sub Bagian
64	Boy. A. H. Djuhari		THL Sub Bagian
65	Agung		THL
66	Ari Supriatna		THL
67	Ramdani		THL

68	Endang Syaripudin		THL
69	Giri Furqoni		THL
70	Ridwan Setiawan		THL
71	Aditya Permana Putra		THL
72	Deny Heryana		THL
73	Freddy Kurniawan		THL
74	Azy Setiadi		THL
75	Achmad Syahroel		THL
76	Muhamad Riki Sugiri		THL
77	Iwan Setiawan		THL
78	Lucky Nurhidayat, ST		THL

Sumber : Sub Bagian Umum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 3.3 jumlah pegawai yang ada di BPPT Provinsi Jawa Barat adalah 79 pegawai. Pegawai BPPT Provinsi Jawa Barat diantaranya terdiri dari 55 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang tenaga kontrak kerja (TKK), 6 orang *office service*, 8 orang tenaga kebersihan dan 6 orang keamanan.

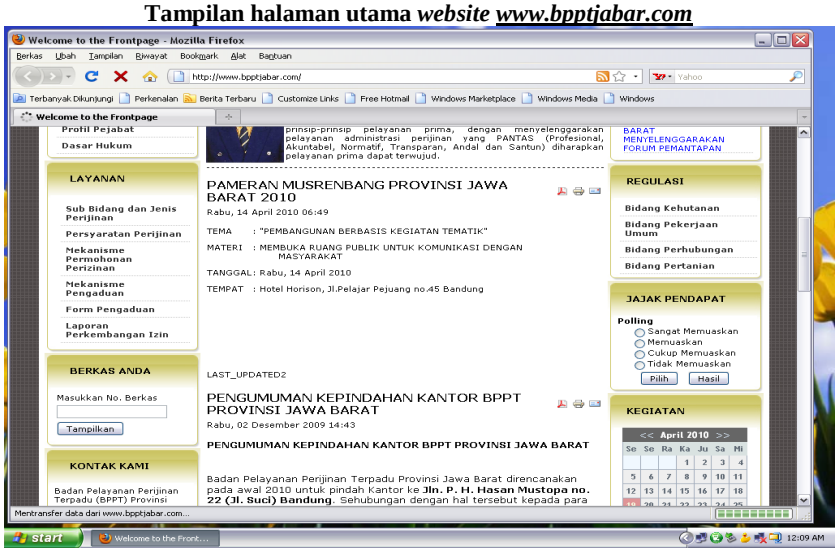
Gambaran Umum *Website www.bpptjabar.com*

Website *www.bpptjabar.com* merupakan sebuah *website* resmi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat. *Website* *www.bpptjabar.com* terbentuk beringinan dengan BPPT itu sendiri. BPPT terbentuk pada tahun 2007, pada saat itu BPPT masih berbentuk PPTSP BPPMD atau sekarang menjadi BKPPMD. BPPT masih menginduk di BPPMD yang memiliki sebuah *website* yang beralamatkan di *westjavainvest.com* yang dibentuk pada tahun 2008 setelah terbentuknya BPPT. Hal ini berdasarkan Perda Nomor 24 tahun 2008. Pada *Website* *www.bpptjabar.com* pemerintah membuatkan satu *template* tersendiri mengenai perijinan. Begitu *template* tersebut di klik, akan tampil beberapa informasi mengenai perijinan, baik mengenai jenis ijin yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan, instansi yang menangani izin, persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur pengajuan dan penerbitannya, disediakannya *form* pengaduan bagi masyarakat dan sebagainya.

Website *www.bpptjabar.com* bertujuan agar pemohon ijin tidak perlu repot untuk bertanya kesana-sini, termasuk kepada petugas. Apabila masyarakat ingin mengajukan pengaduan pada *website* *www.bpptjabar.com* disediakan sarana lain seperti *form* pengaduan yaitu melalui *e-mail* yang disediakan pada *website* ini atau langsung melalui fax, telepon dan sebagainya. Pelayanan melalui *website* ini merupakan suatu bukti bahwa BPPT Provinsi Jawa Barat sungguh-sungguh membuka diri terhadap kebutuhan warganya dan sekaligus menempatkan diri untuk siap

dikoreksi terutama oleh masyarakat. Berikut ini tampilan dari *website* *www.bpptjabar.com* sebagai berikut :

Gambar 3.4
Tampilan halaman utama *website* *www.bpptjabar.com*



Sumber : *http://www.bpptjabar.com* [2010]

Gambar di atas merupakan tampilan awal jika kita ingin mangakses informasi pelayanan perijinan melalui *website* *www.bpptjabar.com* pada Badan Pelayanan perijinan terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat, pada halaman ini juga kita dapat langsung memilih halaman yang akan kita buka atau perlukan informasinya, halaman ini berisi antara lain :

1. Data Istansi

   Data Instansi adalah data mengenai BPPT Provinsi Jawa Barat. Didalamnya memuat sejarah, profil BPPT Provinsi Jawa Barat maupun

profil dari para pejabat, dasar hukum pembentukan BPPT Provinsi Jawa Barat.

2. Layanan Perijinan

   Layanan Perijinan adalah layanan dari instansi yang dimaksud. Dalam hal ini adalah BPPT Provinsi Jawa Barat. Didalamnya memuat sub bidang dan jenis perijinan, persyaratan perijinan, mekanisme permohonan perijinan, mekanisme pengaduan, form pengaduan, dan laporan perkembangan ijin,

3. Halaman Berkas

   Halaman berkas adalah halaman yang memuat data-data berkas pemohon perijinan yang ada di BPPT Provinsi Jawa Barat.

4. Kontak Kami

   Maksud dari kami disini adalah memuat mengenai alamat BPPT Provinsi Jawa Barat dan nomor yang dapat dihubungi.

5. Agenda dan Berita terkini Seputar BPPT Provinsi Jawa Barat

   Berita terkini Seputar BPPT Provinsi Jawa Barat menyajikan bermacam berita yang terjadi di lingkungan BPPT Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memberi kabar kepada Seluruh karyawan BPPT Provinsi Jawa Barat maupun kepada masyarakat.

6. Jajak pendapat

   Jajak pendapat yang disediakan oleh BPPT Provinsi Jawa Barat ini untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kinerja dari pelayanan dari para aparatur BPPT Provinsi Jawa Barat.

Pada halaman utama ini terdapat beberapa informasi mengenai kegiatan, informasi tentang BPPT Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari tugas pokok, fungsi, dasar hukum, profil pejabat, motto dan sebagainya, serta terdapat informasi pelayanan perijinan dari tiap sub bidang apabila di klik maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 3.5, persyaratan perijinan, mekanisme permohonan perijinan, mekanisme pengaduan, laporan perkembangan serta *form* pengaduan. *Website* *www.bpptjabar.com* menyediakan *polling* jajak pendapat bagi masyarakat untuk menilai pelayanan BPPT Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan dan kepuasan bagi masyarakat masyarakat.

Berikut ini adalah tampilan informasi layanan ijin dan layanan non ijin pada tampilan *website* *www.bpptjabar.com* yang dapat dilihat pada gambar 3.5 sebagai berikut :

Gambar 3.5
Tampilan Informasi Layanan Ijin dan Non Ijin

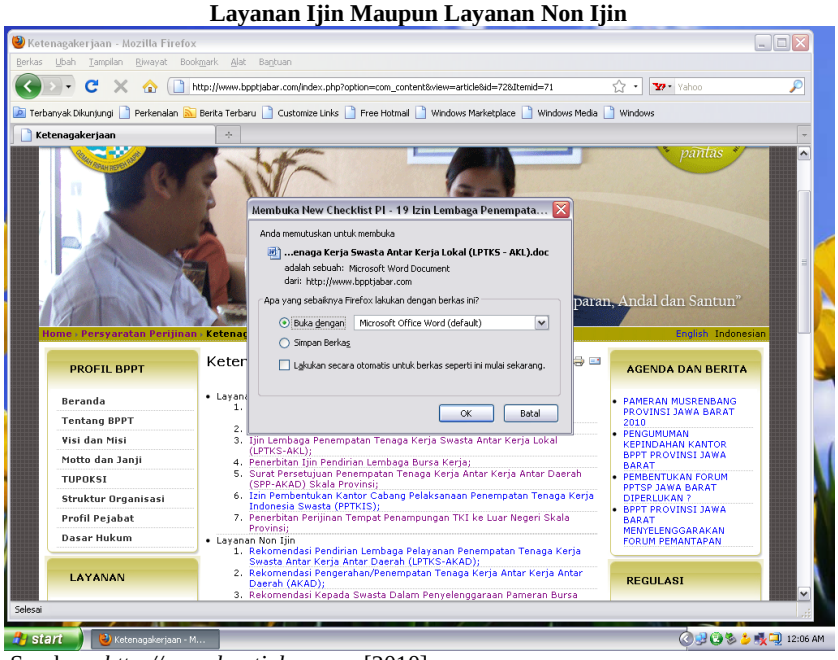


Sumber : *http://www.bpptjabar.com* [2010]

Pada gambar 3.5 merupakan tampilan layanan informasi perijinan pada *website* BPPT Provinsi Jawa Barat. Menu tampilan ini berisi mengenai sub bidang dan jenis perijinan dari masing-masing *stakeholder*, persyaratan perijinan dari masing-masing bidang perijinan, mekanisme permohonan perijinan, mekanisme pengaduan, lalu disediakan pula *form* pengaduan dan laporan perkembangan perijinan yang berisi mengenai laporan bulanan yang dapat di *download* oleh kalangan masyarakat. Jika kita mengklik salah satu dari menu layanan informasi perijinan ini, misalnya seperti gambar 3.5 kita mengklik layanan mengenai persyaratan perijinan ketenagakerjaan maka dalam tampilan akan muncul layanan ijin dan layanan non ijin

ketenagakerjaan, kita pilih salah satu misalnya layanan ijin memperkerjakan tenaga asing (IMTA).

Gambar 3.6
Tampilan untuk *mendownload* Formulir
Layanan Ijin Maupun Layanan Non Ijin

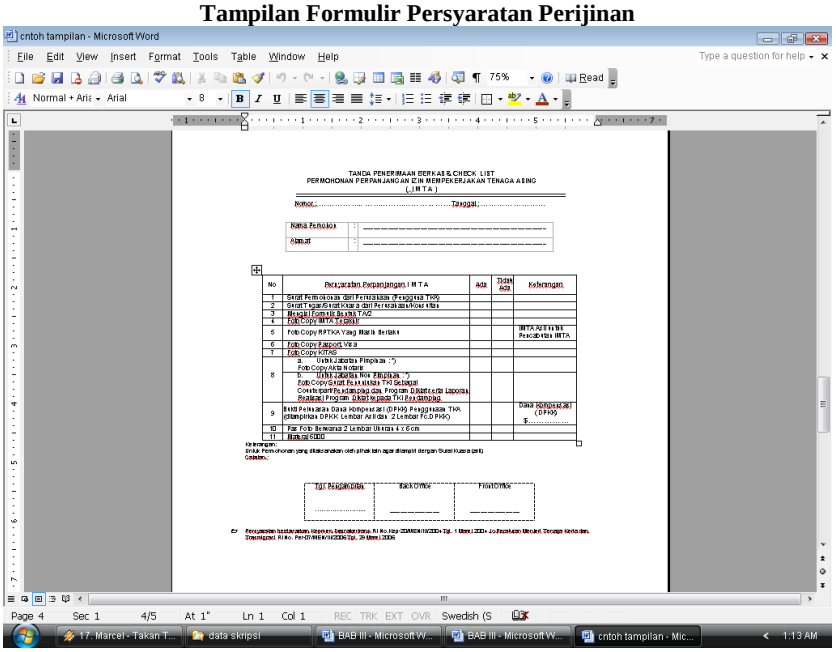


Sumber : *http://www.bpptjabar.com* [2010]

Setelah kita mengklik layanan ijin memperkerjakan tenaga asing (IMTA) maka tampilan akan muncul seperti gambar 3.6. Tampilan ini berfungsi untuk mengunduh atau *mendownload form* persyaratan permohonan ijin memperkerjakan tenaga asing (IMTA). Pada gambar diatas terlihat perintah apakah anda ingin melihat saja file melalui *Microsoft Word* lalu tekan OK atau anda dapat langsung mengunduh

atau *mendownload*-nya melalui *save as* (simpan berkas) dan simpan melalui CD-Room atau flashdisk, atau dapat langsung di print.

Gambar 3.7
Tampilan Formulir Persyaratan Perijinan



Sumber : *http://www.bpptjabar.com* [2010]

Berikut ini adalah tampilan gambar mengenai persyaratan perijinan memperkerjakan tenaga asing (IMTA). Dalam *form* ini berisi mengenai nomor, tanggal, nama pemohon, alamat pemohon, persyaratan perpanjangan IMTA seperti surat permohonan dari perusahaan (pengguna TKA), surat tugas atau kuasa dari perusahaan atau konsultan, mengisi formulir bentuk TA/2, *fotocopy* IMTA terakhir, *fotocopy* RPTKA yang masih berlaku, *fotocopy passport*, visa, *fotocopy* KITAS

untuk jabatan pimpinan, *fotocopy* akta notaris, untuk jabatan non pimpinan, sebagai pelengkap *fotocopy* surat penunjukan TKI sebagai *counterpart* atau pendamping dan program Diklat serta laporan realisasi program Diklat kepada TKI pendamping, bukti pelunasan kompensasi (DPKK) penggunaan TKA (dilampirkan DPKK lembar asli dan 2 lembar *fotocopy* DPKK), pas foto berwarna 2 lembar ukuran 4x6 cm, dan materai 6000.